ILUMINASI: Journal of Research in Education
Vol. 1 No. 2 Tahun 2023 | 185 – 204
http://yphn.ac.id/ejournal/index.php/ILUMINASI/index

Permasalahan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar di Dabin Gugus Raden Sa'id Kabupaten Kudus

Kurniati
Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
ainkurniati87@gmail.com

Achmad Hilal Madjdi
Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
achmad.hilal@umk.ac.id

Siti Chumaidah
Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
chumaidahsiti2@gmail.com

Abstract

PROBLEMS IN IMPLEMENTING SCHOOL-BASED MANAGEMENT IN ELEMENTARY SCHOOLS IN DABIN CLUSTER RADEN SAID KUDUS DISTRICT. School-based management is a way of managing educational institutions in terms of planning, implementing and evaluating education. MBS stands for , a policy approach that aims to shape school leadership by empowering school leaders and increasing community participation in efforts to improve school performance, including teachers, students, parents and the community. In this case, education management according to MBS is different from previous education management which is centralized in nature, while MBS provides broad autonomy to the school unit itself and involves the community to participate in advancing education in schools. In other words, all school policies and programs are determined by the school committee based on deliberations from members consisting of regional education officials, school principals, teachers, parents' representatives, community leaders, and regional officials where the school is located. The democratization of education is carried out by involving elements of the local government, community and parents in a

partnership relationship and fostering positive support for madrasah education. At this level, the decentralization of education as a result of autode includes three important points, namely school-based management, delegation of authority, and educational innovation. The new paradigm in the field of education has pushed towards more humane educational goals. Educational autonomy has provided an opportunity for regions to be able to spur education in their respective regions. While in decentralized management, a lot of central, regional, and regional offices authority is handed over to schools. With this approach, schools will be more empowered and the decisions they make will be more effective and efficient. In the context of implementing SBM, school functions that were originally carried out by the government were partially decentralized to schools to run professionally. For this reason, schools need to build good relations with the community. Schools have programs that need to be introduced to the community, schools also accept criticism and suggestions from the community.

Keywords: *MBS; autonomy; decentralization*

Abstrak

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu cara pengelolaan lembaga pendidikan dalam hal perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan. Mbs adalah singkatan dari , suatu pendekatan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk kepemimpinan sekolah dengan memberdayakan pimpinan sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen pendidikan menurut mbs berbeda dengan manajemen pendidikan sebelumnya yang sifatnya sentralisasi, sedangkan mbs memberikan otonomi yang luas pada unit sekolah itu sendiri dan melibatkan masyarakat untuk berperanserta dalam memajukan pendidikan di sekolah. Dengan kata lain semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah berdasarkan musyawarah dari para anggota yang terdiri dari pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, guru-guru, perwakilan orangtua siswa, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah di mana sekolah itu berada. Penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan madrasah. Pada tingkatan demikian, desentralisasi pendidikan akibat otoda meliputi tiga pokok penting, yaitu manajemen berbasis sekolah

, pendelegasian wewenang, dan inovasi pendidikan. Paradigma baru bidang pendidikan itu telah mendorong pada tujuan-tujuan pendidikan yang lebih humanis. Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Sedang pada manajemen desentralistik, banyak kewenangan pusat, wilayah, dan kandep yang diserahkan ke sekolah. Dengan pendekatan ini, maka sekolah akan lebih berdaya dan keputusan-keputusan yang dibuatnya akan lebih efektif dan efisien bahwa dalam rangka pelaksanaan mbs, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara professional . Untuk itu, sekolah perlu membangun hubungan baik dengan masyarakat. Sekolah memiliki program-program yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, sekolah juga menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Selain itu masyarakat dapat memantau dan menilai program-program sekolah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi sekolah..

Kata kunci: MBS; otonomi; desentralisasi

A. Pendahuluan

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu cara pengelolaan lembaga pendidikan dalam hal perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan. Mbs adalah singkatan dari “manajemen berbasis sekolah”, suatu pendekatan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk kepemimpinan sekolah dengan memberdayakan pimpinan sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.pelaksanaan mbs yang baik berdampak positif terhadap perubahan perilaku anak sekolah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Tetapi, ada juga kendala dalam penerapan MBS tersebut seperti tantangan meningkatkan partisipasi, hambatan terhadap transparansi, kendala peningkatanakuntabilitas. Selain itu ada indikator keberhasilan mbs juga antara lain:pendidikan yang berkeadilan (berupa kesempatan yang sama antara siswa desa -kota, kaya dan miskin, laki -laki dan perempuan, cacat dan tidak cacat).tingkat pendidikan (input, proses, output).efikasi dan efisiensi pendidikan (tingkat kenaikan kelas, angka kelulusan, angka putus sekolah). Kepemimpinan sekolah yang efektif (melalui partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, kejelian, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktabilitas, kepekaan, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, dan kepastian jaminan hukum)(Dahlia, Anam. Khairul, Syarifudin, 2023).

Kekuatan yang hakiki dari reformasi bangsa dimulai dari sumber daya manusia yang memiliki visi, dan kepribadian yang mau mengedepankan kepentingan orang banyak dalam berbagai aspek kehidupan. SDM sehingga mau saja menerima keadaan yang telah merendahkan harkat dan martabat bangsa yang nampak dari kemiskinan, kebodohan dan tidak tegaknya hukum.

Banyak faktor yang ikut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, namun salah satu yang diduga besar pengaruhnya ialah faktor manajemen pendidikan, terutama manajemen berbasis sekolah .

Dalam hal ini, manajemen pendidikan menurut mbs berbeda dengan manajemen pendidikan sebelumnya yang sifatnya sentralisasi, sedangkan mbs memberikan otonomi yang luas pada unit sekolah itu sendiri dan melibatkan masyarakat untuk berperanserta dalam memajukan pendidikan di sekolah. Dengan kata lain semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah berdasarkan musyawarah dari para anggota yang terdiri dari pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, guru-guru, perwakilan orangtua siswa, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah di mana sekolah itu berada. Pada hakikatnya esensi mbs adalah peningkatan otonomi sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah (Pratiwi. Sri Nurabdiah, 2016).

Pentingnya peran pendidikan disadari oleh pemerintah indonesia dalam membangun bangsa indonesia yang kuat dalam menghadapi era globalisasi. Indonesia sebagai pendidikan dasar. Bukti lain dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yakni adanya alokasi 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Kemudian adanya penetapan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai bukti dari pemerintah untuk mempersiapkan generasi bangsa kelak seluruh komponen pendidikan harus terlibat dalam proses pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Ada beberapa faktor dalam proses pendidikan meliputi input yang terdiri dari metodologi, bahan ajar, sarana sekolah, sarana prasarana, dukungan administrasi, penciptaan suasana yang kondusif serta sumber daya lainnya. Selain input, mutu pendidikan juga penting berkaitan dengan hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah baik prestasi akademis atau non akademis seperti dalam olahraga, seni dan yang lainnya pada kurun waktu tertentu (Mawaddah. Maya, Shobri, Kamal. Yusaini, 2021).

Selama Masih Ada Kesenjangan Antara Hasil Pendidikan Dengan Ke Butuhan Tenaga Kerja, Ada Kesenjangan Harapan Akan Prestasi, Selama Itu Pula

Problema Pendidikan Akan Terus Bergema. Kebijakan Yang Sudah Ada Sekarang Ini. Terkait Dan Sepadan Dengan Pengorganisasian Muatan Lokal , Masih Belum Tuntas Dilaksanakan. Sekarang Dihadapkan Pula Pada Otonomi Daerah Yang Menuntut Pengelolaan Pendidikan Secara Otonom Dengan Model Manajemen Berbasis Sekolah Atau (School Based Management). Kondisi Tersebut Menuntut Pemikiranpemikiran Yang Sistematis, Untuk Merumuskan Bentuk Hubungan Kerja Yang Sesuai Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Dan Relevansi Pendidikan. Dari Berbagai Problema Dan Tantangan Yang Menyertainya, Baik Secara Konseptual Maupun Secara Operasional Pelaksanaan Model Manajemen Berbasis Sekolah, Maka Urgensi Penelitian Mi Dilaksanakan Untuk Mengkaji Lebih Mendalam Pada Tingkat Aktualisasi Realitasnya Yang Lebih Nil (Nasarruddin, Muslimin, 2018).

Cita-cita yang diharapkan dalam pendidikan nasional kita antara lain meningkatnya karakter bangsa untuk mendukung terwujudnya kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yangmahaesa, berakhlak,mulia, sehat, berilmu, cakap, produktif, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, tidak diskriminatif, serta berbudaya, bermartabat dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan negara kesatuan republik indonesia. Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan strategi dalam pendidikan untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah kepada pihak sekolah, melibatkan stakeholder untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personel, dan kurikulum. Pendidikan sentralisasi kurang mendidik manajemen sekolah untuk lebih mandiri, baik dalam segi manajemen pepemimpinan, profesionalismeguru, pengembanganinstitusional, pengembangankurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya dan terutama membangun partisispasi masyarakat untuk lebih memiliki sekolah (Triyarsih. Maria Goretti, 2019).

Era globalisasi ditandai oleh perkembangan yang semakin cepat di segala bidang kegiatan, begitu pula dalam kegiatan pendidikan. Globalisasi ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan di indonesia sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seperti yang disampaikan dalam penjelasan umum atas undang-undang no. 14 tahun 2005, pembukaan undang-undang dasar untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara

terus menerus (Musbir, 2014). Proses dikatakan bermutu tinggi jika adanya dan keserasian serta pemaduan.

Input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara terorganisasi, sehingga dapat menciptakan situasi pembelajaran yang enjoyable learning, mampu mendorong sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan mereka tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya). Pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasiyang dihasilkan dari proses/ perilaku sekolah (junindra. Arespi, nasti. Betridamela, rusdinal, Gistituati. Nurhizrah, 2022).

Pendidikan yang dianggap baik tidak hanya akan melibatkan input secara fisik seperti pada ruang kelas, guru dan pada buku teks tetapi juga pada pengajaran dan aspek pembelajaran yang lebih baik. . Pendidikan merupakan sarana untuk menerjemahkan suatu amanat ke dalam konstitusi nasional dan sarana untuk membangun karakter bangsa. Dengan konsep asas desentralisasi, pihak sekolah memiliki nilai kemandirian untuk dapat mengelola lembaganya melalui suatu manajemen basis sekolah manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan.kebijakan tersebut mengharuskan sekolah untuk langsung memimpin penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan manajemen sekolah adalah suatu bentuk penyelenggaraan atau pengelolaan sekolah yang akan dipercayakan sepenuhnya kepada sekolah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat tercapai, sesuai dengan ketentuan undang-undang pendidikan yang berlaku saat ini.munculnya masalah manajemen sekolah didorong oleh tidak adanya sistem pendidikan yang sudah ada sebelumnya.manajemen berbasis sekolah dapat dipahami sebagai model model manajemen yang memberikan pemberdayaan yang lebih besar kepada sekolah dan akan mendorong partisipasi langsung masyarakat di sekolah dan masyarakat agar mutu sekolah dapat ditingkatkan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Askan. Ali, Kusmanto. Agung Slamet, 2022).

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan perlu melakukanlangkah-langkah strategis untuk memberdayakan semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari masyarakat , orang tua siswa, pemerintah sampai kepada manajemen sekolah itu sendiri. Tujuan pemberdayaan aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah untuk kepentingan kemajuan pendidikan disekolah, sehingga dengan demikian segala macam kebutuhan di sekolah mulai dari perbaikan sistem pengajaran, perbaikan mutu guru, pengadaan gedung, sarana dan prasarana sekolah sampai kepada pembiayaan lainnya dapat terpenuhi semua ini dilakukan untuk kepentingan proses belajar mengajar siswa di sekolah yang memungkinkan siswa dapat meningkatkan mutu belajarnya. Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu sistem nasional, diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003. Aturan yang berkaitan dengan kewenangan daerah tertuang dalam pp no. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, tidak ada ketetapan tentang strategi yang digunakan. Strategi implementasi mbs akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, dan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun demikian, implementasi mbs akan berhasil apabila bertolak dari strategi yang mengacu kepada prinsip dan karakteristik mbs itu sendiri. Manajemen pendidikan merupakan suatu tindakan manajemen yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, membimbing, mengarahkan dan mengawasi setiap aktifitas manajemen yang dilakukan orang-orang yang tergabung dalam organisasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan yang dimaksudkan disini sangat beragam tujuan pendidikan pada tingkat nasional, institusi sekolah sampai tujuan kurikulum. Pencapaian semua tujuan-tujuan diatas dalam aktivitas manajemen ditujukan kepada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Manajemen berbasis sekolah sebagai terjemahan dari school basid management adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah sebagai suatu model pengelolaan pendidikan yang bertumpu pada sekolah, banyak diadopsi oleh system persekolahan untuk meningkatkan otonomi sekolah dan member kesempatan kepada guru-guru, orang tua siswa dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam

manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan (Risno. Dita Novelina, 2015).

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah model pengelolaan lembaga sekolah dengan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah bersama masyarakat untuk mewujudkan kemandirian sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. Implementasi MBS di SD 1 COLO yang terbilang baru ini sudah cukup baik tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah dengan mengkombinasikan penggunaan kurikulum 2013 dengan Cambridge, dimana fokus utamanya yaitu berbasis islami dan berbasis digital. Cara sekolah dalam melakukan promosi lembaganya yaitu dengan memanfaatkan perkembangan media sosial dan juga secara manual, dan hal ini berlangsung cukup efektif ditandai dengan adanya peningkatan minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan menengah mereka di SD 1 COLO dari tahun ke tahun. Disamping itu, juga terdapat kekurangan yang salah satunya pada personalia seperti pada tenaga administrasi yang masih sangat minim yang hanya dibebankan kepada satu orang saja. Sangat diharapkan kepada pihak sekolah untuk melakukan rekrutmen tenaga administrasi mengingat makin meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahunnya. Dalam hal pendanaan lembaga sekolah diharapkan agar sekolah tidak hanya mengandalkan dana dari yayasan, dana BOS dan SPP saja tetapi sebaiknya bisa diperluas lagi dengan mencari masukan dana ke berbagai pihak instansi agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang mungkin belum bisa tercapai (Putri. Lyindira, 2019).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga dan masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argument terhadap apa yang ditentukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

1. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan, yaitu mengadakan kegiatan menghimpun data di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

1. Observasi

   Observasi menurut Sustrisno Hadi dalam Sugiyono (2003;166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Agar penelitian mendapatkan gambaran selengkap mungkin, maka peneliti mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada di lapangan observasi ini yaitu pengamatan langsung pada objek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui percakapan langsung atau dikenal dengan interview atau wawancara antara peneliti dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memastikan dan memperkuat fakta yang di peroleh.

C. Pembahasan

Pemerintahan

1) Otonomi Daerah

Pemahaman otonomi daerah di indonesia dilandaskan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah yaitu undang-undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keperntingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat daerah, khususnya dalam arti terciptanya kesejahteraan yang merata di daerah. Dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggungjawab administratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pemerintah pusat. Keempat bentuk tersebut menjadi model desentralisasi di indonesia sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemahaman tentang desentralisasi perlu juga dipahami dalam berbagai kontek

keotonomian. Otonomi luas adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Aziz. Ahmad Zaini, 2015).

Otonomi daerah telah memunculkan desentralisasi pendidikan berpola MBS. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, serta terciptanya infrastruktur kedaerahan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan menjadi focus dari MBS. Penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikutsertakan unsurunsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan madrasah. Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan lingkungan. Selain itu, perluasan kurikulum juga harus bisa memajukan budaya daerah untuk memperkaya khasanah budaya nasional. Pada tingkatan demikian, desentralisasi pendidikan akibat otoda meliputi tiga pokok penting, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS), pendelegasian wewenang, dan inovasi pendidikan. Paradigma baru bidang pendidikan itu telah mendorong pada tujuan-tujuan pendidikan yang lebih humanis. Di situ peserta didik membangun agar lebih mengerti dan berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan landasan kearifan lingkungan (Aini. Masyithoh, 2022).

Dengan diterapkan Undang-undang tersebut, maka pemerintah terutama pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) yang terbentang dari sabang sampai ke merauke harus berperan aktif untuk meningkat mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh bahwa pendidikan merupakan Urat nadinya suatu daerah, kalau pendidikannya maju, maka di bidang-bidang yang akan ikut maju. Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masingmasing. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya ke pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing- masing. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil dari masyarakat juga harus bisa memainkan perannya untuk dapat memantau tentang perkembangan pendidikan, dan bisa untuk berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Tanpa partisipasi dari semua pihak maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan. Otonomi pendidikan adalah merupakan angin segar dalam rangka untuk memberikan dan menjadikan mutu pendidikan lebih baik dan sempurna. Hal ini didukung oleh

bahwa masyarakat secara umum telah dapat berbuat banyak dalam memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Kemarjinalan selama ini bisa dihilangkan dan di buang jauhjauh (Ridwan. Iwan, 2021)

2) Desentralisasi

Desentralisasi di indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya uu no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Menurut uu no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Salah satu desentralisasi pada bidang pendidikan ialah manajemen berbasis sekolah yaitu bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu. Sedang pada manajemen desentralistik, banyak kewenangan pusat, wilayah, dan kandep yang diserahkan ke sekolah. Dengan pendekatan ini, maka sekolah akan lebih berdaya dan keputusan-keputusan yang dibuatnya akan lebih efektif dan efisien bahwa dalam rangka pelaksanaan mbs, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara professional (Saputra. Indra, Firman, Ahmad. Riska,2022).

Manajemen berbasis sekolah dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua dan masyarakat sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Maksud diberikannya otonomi di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi, serta pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkem bangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan

peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Di samping itu juga, sekolah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan semua unsur terkait untuk memajukan sekolah serta meningkatkan manajemen sekolah dalam rangka membebaskan pengalokasian sumber daya dari kepentingan yang lebih bersifat edukatif (Husnussadah, 2017)

- **Masyarakat**

  Peningkatan mutu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dilandasi dengan keyakinan jika seseorang dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai «rasa memiliki» terhadap sekolah sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian, semakin besar tingkat partisipasi, semakin besar pula rasa memiliki, semakin besar pula rasa tanggung jawab, semakin besar pula dedikasinya. Dengan demikian masyarakat yang mendukung program sekolah hasil kesepakatan telah berperan serta dalam pelaksanaan. Demikian pula dalam perjalanan program, tentunya perlu kontrol dan upaya-upaya untuk memperbaiki. Hal itu merupakan contoh peran serta masyarakat dalam mengevaluasi. . Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran anak. Untuk itu, sekolah perlu membangun hubungan baik dengan masyarakat.
  Sekolah memiliki program-program yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, sekolah juga menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Selain itu masyarakat dapat memantau dan menilai program-program sekolah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi sekolah (Aisyah. Siti , Astuti, Yahya, 2021).

  Peran serta masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan

masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dengan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam lampiran II kepmendiknas no. 044 tahun 2002 komite sekolah didefinisikan sebagai: «badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Risno. Dita Novelina, 2015).

- **Sekolah**

  Sekolah bermutu, setiap orang menjadi kostumer dan pemasok sekaligus. Secara khusus kostumer adalah siswa dan keluarganya. Tanggung jawab sekolah bermutu terpadu adalah melakukan kerjasama dengan orangtua dalam mengoptimalkan potensi siswa agar mendapat manfaat dari proses belajar di sekolah. Sekolah memiliki kostumer internal dan eksternal, dimana kostumer internal adalah orangtua, siswa, guru, administrator, staf dan dewan sekolah yang berada di dalam sistem pendidikan. Kostumer eksternal adalah masyarakat, keluarga, militer, perusahaan, organisasi lain yang memanfaatkan output proses pendidikan. Manajemen mutu terpadu juga merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga menuntut setiap orang memberi kontribusi bagi upaya mutu. Untuk mengetahui adanya upaya mutu dalam manajemen, pengukuran merupakan salah satu bagian yang harus dilaksanakan secara maksimal, hanya saja sering sekali gagal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan pengukuran mutu hanya berdasarkan pada keluaran sekolah berdasarkan prestasi siswa melalui hasil ujian. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis setiap data yang diperlukan dalam upaya mutu. Hal penting lain dalam manajemen mutu terpadu adalah komitmen yang dimiliki sekolah, dalam proses transformasi mutu. Oleh karena itu setiap orang perlu mendukung upaya mutu. Orang biasanya sulit untuk mau berubah, tapi manajemen harus mendukung proses perubahan dengan memberi pendidikan, perangkat, sistem dan proses meningkatkan mutu. Bagian penting lainnya dalam manajemen mutu terpadu adalah melakukan perbaikan berkelanjutan melalui cara untuk menangani masalah yang muncul, mencari cara memperbaiki proses yang dikembangkan dan membuat perbaikan yang diperlukan(Pratiwi. Sri

Nurabdiah, 2016,)

Peningkatan mutu Sekolah Dasar di era otonomi Daerah membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak sekolah, dan seluruh *Stakeholders* pendidikan yang terkait. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan adanya desentralisasi dalam sistem kependidikan diIndonesia pemerintah haruslah memperluas inovasi Manajemen Berbasis Sekolah ke seluruh pelosok daerah agar adanya keadilan anak bangsa dalam mengenyam pendidikan. Kata kunci dari penguatan sistem otonomi daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar adalah harus adanya kemauan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memaksimalkan seluruh potensi daerah yang ada untuk digunakan seefektif mungkin dalam mengelola pendidikan (Priatna. Asep, 2019)

- **Pendidik Dan Tenaga Pendidikan**

Manajemen Tenaga Kependidikan Adalah Aktivitas Yang Harus Dilakukan Mulai Dari Tenaga Kependidikan Itu Masuk Ke Dalam Organisasi Pendidikan Sampai Akhirnya Berhenti Melalui Perencanaan, Perekrutan, Seleksi, Penempatan, Pemberian Kompensasi, Penghargaan, Pendidikan Atau Pengembangan, Hingga Pemberhentian (Tim Dosen Adminitrasi Pendidikan UPI, 2012). Adapun Manajemen Tenaga Kependidikan (Guru Dan Personil) mencakup (1) Perencanaan Pegawai, (2) Pengadaan Pegawai, (3) Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai, (4) Promosi Dan Mutasi, (5) Pemberhentian Pegawai, (6) Kompensasi, Dan (7) Penilaian Pegawai. Ketujuh Hal Tersebut Harus Dilakukan Agar Tenaga Kependidikan Yang Dimiliki Sekolah Dapat Sesuai Dengan Karakter Sekolah (Indrayadi. Alviansyah Putra, Devi. Danila Rusdiana, Juliana Ria dkk, 2021).

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Karena

itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara tepat. Pengelolaannya bukan hanya sekedar pengadaan sumber daya manusia, melainkan harus dengan menggunakan fungsifungsi manajemen, mulai dari perencanaan yang matang, melakukan rekrutmen dan seleksi, pengangkatan dan penempatan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, pemberian kompensasi secara adil, serta melakukan pengawasan dan penilaian agar tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan searah dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Nurlindah, Mustami. Muh. Khalifah, Musdalifah, 2020)

Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan Pembenahan manajernen sekolah. Sekolah agama, merupakan sebuah langkah besar yang sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama menjadi setara bahkan melebihi profesionalisme pendidikan umum modern lainnya. Salah satu bentuk wujud profesionalis dan usaha peningkatan kualitas pendidikan modern ialah mengembangkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mengelola pendidikan. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya atau memakai tempat apa adanya dan lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah. Hanya saja semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya belum banyak dibarengi dengan profesionalitas dalam manajemen madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumber daya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan , sistem pembelajaran, sumber daya manusia sumber dana maupun fasilitas yang memadai faktor lain yang dihadapi oleh madrasah adalah masyarakat agaknya kurang memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri (Gaffar. H. Mukminin, 2012).

D. Simpulan

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu cara pengelolaan lembaga pendidikan dalam hal perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan. Mbs adalah singkatan dari (manajemen berbasis sekolah), suatu pendekatan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk kepemimpinan sekolah dengan memberdayakan pimpinan sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen pendidikan menurut mbs berbeda dengan manajemen pendidikan sebelumnya yang sifatnya sentralisasi, sedangkan mbs memberikan otonomi yang luas pada unit sekolah itu sendiri dan melibatkan masyarakat untuk berperanserta dalam memajukan pendidikan di sekolah. Dengan kata lain semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah berdasarkan musyawarah dari para anggota yang terdiri dari pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, guru-guru, perwakilan orangtua siswa, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah di mana sekolah itu berada. Sekarang Dihadapkan Pula Pada Otonomi Daerah Yang Menuntut Pengelolaan Pendidikan Secara Otonom Dengan Model Manajemen Berbasis Sekolah Atau . Dari Berbagai Problema Dan Tantangan Yang Menyertainya, Baik Secara Konseptual Maupun Secara Operasional Pelaksanaan Model Manajemen Berbasis Sekolah, Maka Urgensi Penelitian Mi Dilaksanakan Untuk Mengkaji Lebih Mendalam Pada Tingkat Aktualisasi Realitasnya Yang Lebih Nil. Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan strategi dalam pendidikan untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah kepada pihak sekolah, melibatkan stakeholder untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personel, dan kurikulum.

Penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikutsertakan unsurunsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan madrasah. Pada tingkatan demikian, desentralisasi pendidikan akibat otoda meliputi tiga pokok penting, yaitu manajemen berbasis sekolah , pendelegasian wewenang, dan inovasi pendidikan. Paradigma baru bidang pendidikan itu telah mendorong pada tujuan-tujuan pendidikan yang lebih humanis. Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya ke pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing- masing. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat selaku

wakil dari masyarakat juga harus bisa memainkan perannya untuk dapat memantau tentang perkembangan pendidikan, dan bisa untuk berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing.

Salah satu desentralisasi pada bidang pendidikan ialah manajemen berbasis sekolah yaitu bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu. Sedang pada manajemen desentralistik, banyak kewenangan pusat, wilayah, dan kandep yang diserahkan ke sekolah. Dengan pendekatan ini, maka sekolah akan lebih berdaya dan keputusan-keputusan yang dibuatnya akan lebih efektif dan efisien bahwa dalam rangka pelaksanaan mbs, fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian didesentralisasikan kepada sekolah untuk dijalankan secara professional . Untuk itu, sekolah perlu membangun hubungan baik dengan masyarakat. Sekolah memiliki program-program yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, sekolah juga menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Selain itu masyarakat dapat memantau dan menilai program-program sekolah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi sekolah. Hal ini disebabkan pengukuran mutu hanya berdasarkan pada keluaran sekolah berdasarkan prestasi siswa melalui hasil ujian. Peningkatan mutu Sekolah Dasar di era otonomi Daerah membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak sekolah, dan seluruh Stakeholders pendidikan yang terkait. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan artikel konseptual ini dapat terselesaikan, serta seluruh tim redaksi *Equity in Education Journal* (EEJ) yang telah memberikan kesempatan artikel ini dapat dipublikasikan pada jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aini. Masyithoh, 2022, Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman P-ISSN: 1907-2333 E-ISSN: 2685-9211 Volume 12 Nomor 1, Juni 2022, h. 95 – 106, https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1122 , https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1122

Aisyah. Siti , Astuti, Yahya, 2021, Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTS Al-Faaizun Watang Palakka, Vol. IX. Issu 1. Januari - April 2021, http://dx.doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.3805 , https://www.researchgate.net/publication/348207360_Peran_Manajemen_Berbasis_Sekolah_Dalam_Meningkatkan_Partisipasi_Masyarakat_di_MTS_AL-Faaizun_Watang_Palakka

Askan. Ali, Kusmanto. Agung Slamet, 2022, Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022 Halm 6325 – 6335, https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3556 https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/3556

Aziz. Ahmad Zaini, 2015, Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal El-Tarbawi, https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5 , https://journal.uii.ac.id/Tarbawi/article/view/3975

Dahlia, Anam. Khairul, Syarifudin, 2023, Manajemen Berbasis Sekolah, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, HUMANTECH, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol 2 No 7, ISSN: 2809-1612, http://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3257/2752

Gaffar. H. Mukminin, 2012, Manajemen Pendidikan Madrasah Dan Otonomi Daerah, *7*(2), 128-137. https://doi.org/10.24252/.v7i2.1384 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1384

Husnussadah, 2017, Manajemen Berbasis Sekolah, Vol 1 No 1 (2017): El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, https://journal.parahikma.ac.id/el-idarah/article/view/239

Indrayadi. Alviansyah Putra, Devi. Danila Rusdiana, Juliana Ria dkk, 2021, Manajemen Berbasis Sekolah Pada Komponen Tenaga Kependidikan Dan Kesiswaan, *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 4 Nomor 3 September 2021,* http://dx.doi.org/10.17977/um027v4i32021p195 http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/11411

Junindra. Arespi, Nasti. Betridamela, Rusdinal, Gistituati. Nurhizrah, 2022, Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar, *Jurnal CERDAS Proklamator,* Vol. 10, No. 1,

Edisi Juni 2022, 88-94, https://doi.org/10.37301/cerdas.v10i1.124 , https://cerdas.bunghatta.ac.id/index.php/jcp/article/view/124

Mawaddah. Maya, Shobri, Kamal. Yusaini, 2021, Analisis Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Budaya Organisasi (Studi Deskriptif Di Smpn 8 Kota Serang Dan Smpn 19 Kota Serang), Vol. 6 No. 2 (2021): Desember 2021, https://doi.org/10.32678/annidhom.v6i2.5384, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/annidhom/article/view/5384

Musbir, 2014, Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 4 Peusangankabupaten Bireuen, VOL. XIV NO. 2, 260-274, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2014, http://dx.doi.org/10.22373/jid.v14i2.502

Nasarruddin, Muslimin, 2018, Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada SD Inpres Bira 1 Kota Makassar, e-ISSN: 2597-4440 dan p-ISSN: 2597-4424, Vol,2. No,2. Tahun 2018, JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan, https://doi.org/10.26858/jkp.v2i2.6856 , https://ojs.unm.ac.id/JIKAP/article/view/6856

Nurlindah, Mustami. Muh. Khalifah, Musdalifah, 2020, Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, JURNAL IDAARAH, VOL. IV, NO. 1, JUNI 2020, https://dx.doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13893 https://www.neliti.com/id/publications/338029/manajemen-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan

Pratiwi. Sri Nurabdiah, 2016, Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah, Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016, ISSN: 2442-6024, https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.578 https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/578

Priatna, A. (2019). Manajemen Berbasis Sekolah (Orientasi Baru Pengembangan Mutu Pendidikan Dasar Di Era Otonomi Daerah). *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *1*(1), 1 - 9. https://doi.org/10.36989/didaktik.v1i1.3 https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/3

Putri. Lyindira, 2019, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di Smp Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 5 Nomor 2 (2019), https://dx.doi.org/10.18592/moe.v5i2.5325 https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/article/view/5325

Ridwan. Iwan, 2021, Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah, Vol 7, No 1 (2021), https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611

Risno. Dita Novelina, 2015, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Aspek Peran Serta Masyarakat Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang, Vol 3, No 2 (2015), https://doi.org/10.24036/bmp.v3i2.5234 , https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/5234

Saputra. Indra, Firman, Ahmad. Riska,2022, Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi), Vol 10, No 2 (2022), https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/Keguruan/article/view/6571